|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (3) 909-922ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**PERAN *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF) DALAM REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI ACEH PASCA TSUNAMI**

**Alexandra Natalia Rotty[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1202045124**

***Abstract***

*The earthquake and tsunami that occurred in Aceh on December 26, 2004 took about thousands lives and destroyed all aspects of life support such as houses and infrastructures. This tsunami also has an impact on physical and non physical environment destructions. Based on that conditions, disaster management efforts carried out by the government and various parties from national scale and abroad that provide humanitarian assistance and engage in such disaster management activities. One of them is WWF. The purpose of this research is to explain the role of World Wide Fund for Nature (WWF) in Aceh's post-tsunami reconstruction and rehabilitation activities. WWF shows their role in reconstruction and rehabilitation efforts by establishing and running several programs such as TFA, monitoring illegal logging, rehabilitation of coastal ecosystems (Green Coast Project), and watershed management (DAS).*

***Keywords:*** *: World Wide Fund for Nature (WWF), Aceh tsunami, reconstruction and rehabilitation*

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap bencana berdasarkan data Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Resiko Bencana (UN-ISDR). Hal ini karena posisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu : Lempeng Australia di selatan, lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Salah satu bencana besar yang pernah melanda Indonesia yaitu gempa dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya pada tanggal 26 Desember 2004.Dibanding dengan negara-negara di sekitar Samudra Hindia, Indonesia khususnya Aceh dan Sumatera Utara adalah wilayah paling parah yang terkena dampak bencana ini.

Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini sangat besar mulai dari korban jiwa, rumah penduduk dan infrastruktur yang hancur serta keadaan alam yang rusak.Kondisi parah pasca tsunami tersebut membuat pemerintah setempat dan pusat melakukan upaya penanggulangan dampak bencana.Ada tiga tahap upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan pemerintah yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.Besarnya dampak yang diakibatkan membuat banyak relawan datang dari dalam maupun luar negeri untuk membantu proses penanganan korban maupun membangun infrastruktur yang rusak.

*World Wide Fund for Nature* (WWF) merupakan salah satu organisasi Internasional non-pemerintah dan bergerak dibidang konservasi lingkungan yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana ini, khususnya pada upaya rekonstruksi dan rehabilitas. Keterlibatan WWF pasca tsunami tersebut fokus pada upaya rekonstruksi perumahan dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak.Hal ini selain karena keterbatasan pemerintah memenuhi kebutuhan rekonstruksi, juga karena bantuan kemanusiaan dari berbagai organisasi maupun negara hanya terfokus pada tanggap darurat, sedangkan pada upaya rekonstruksi dan rehabilitasi ekosistem lingkungan kurang mendapat perhatian khusus. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran WWF dalam kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Teori Peran Organisasi Internasional***

Organisasi Internasional secara universal merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional (dunia) secara sukarela atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tatanan hubungan internasional.Pada dasarnya organisasi internasional dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu *Inter-Governmental Organization/*IGO (Organisasi Antar Pemerintah) yang anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara di dunia contohnya PBB dan WTO. Lalu *Non- Governmental Organization*/NGO (Organisasi non pemerintah) yang merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya seperti WWF dan *Care International*. Secara sederhanadari beberapa definisi para ahli dapat dirumuskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerja sama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan.

Teori peran diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan dan tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi.Peranan organisasi internasional dalam hubungan Internasional kontemporer diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi suatu negara.

Setelah mengetahui pengertian organisasi Internasional, ada tiga kategori peran dari organisasi Internasional tersebut, diantaranya sebagai Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik(jika ada) dan menyelaraskan tindakan, sebagai Arena(forum/wadah), yaitu berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agrement dan sebagainya). serta sebagai pelaku (aktor) yang bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa keberadaan organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Pada penelitian ini, WWF sebagai organisasi internasional non-pemerintah menunjukkan perannya dalam membantu pemerintah pada upaya penanggulangan pasca bencana tsunami di Aceh.

***Konsep Natural Disaster Management***

Manajemen bencana merupakan strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangani bencana.*University of Wisconsin* menggambarkan manajemen bencana sebagai serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat dan untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan terhadap bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut.Secara umum manajemen bencana bertujuan untuk mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, merelokasi korban ke daerah baru yang layak huni dan aman, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama yang terkena bencana, serta meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Ada tiga fase kegiatan berdasarkan periode bencana, yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pada periode pra bencana kegiatan ini disebut manajemen Resiko Bencana dengan fase-fase antara lain: pencegahan *(prevention)* bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana, mitigasi (*mitigation*) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan peringatan dini.

Kegiatan selanjutnya saat bencana terjadi adalah Manajemen Kedaruratan dengan fasenya yaitu tanggap darurat (*Emergency Response*) yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, seta pemulihan prasarana dan sarana. Dan terakhir ialah kegiatan pasca bencana yang disebut manajemen Pemulihan (*Recovery*) yang merupakan manajemen upaya penanggulangan bencana dengan mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana. Fase-fase dalam kegiatan pemulihan ini diantaranya rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, serta rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, pada tingkat pemerintah maupun masyarakat agar berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Dari penjelasan konsep diatas, dalam upaya mengatasi bencana ada manajemen penanggulangan yang dilakukan berdasarkan periode bencana baik sebelum, saat terjadi maupun pasca terjadi yang terbagi lagi kedalam fase-fase kegiatan.Pada penelitian ini, WWF berperan dalam manajemen Pemulihan yaitu pasca bencana khususnya pada fase rekonstruksi serta rehabilitasi.

**Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptifuntuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana peran WWF dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini untuk mendukung penulis pada penelitian melalui berbagai literatur seperti buku-buku pustaka, jurnal, file yang didownload di intenet, surat kabar dan dokumentasi.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan(*library research)* yaitu mengumpulkan data teori dan konsep melalui buku-buku ilmiah,buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, dimana informasi yangdiperoleh dituangkan dalam bahasa yang dapat menjelaskan hubungan antara datasatu dengan data lainnya sehingga dapat diperoleh kebenaran atas informasi tersebut.Dalam hal ini, analisa yang dilakukan ialah terhadap bencana tsunami yang terjadi di Aceh serta peran WWF dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami tersebut..

**Hasil Penelitian**

Pada 26 Desember 2004 gempa bumi terjadi di Samudra Hindia, lepas pantai barat Aceh dengan kekuatan gempa 9 SR (berdasarkan *United State Geological Survey, USGS*). Pusat gempa terletak pada koordinat 3,2980 LU dan 95,7790 BT, kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh dengan kedalaman 20 km.Ada beberapa negara yang terkena dampak ini yaitu Sri Lanka, India, Thailand, Indonesia dan beberapa wilayah di pantai timur Afrika. Indonesia merupakan wilayah yang terkena dampak paling parah. Keberadaan Indonesia yang terletak pada dua jalur gempa yaitu: jalur *circum Pacific* dan jalur Himalaya-Mediterania serta berada di antara tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia dan Eurasia membuat bencana alam rawan terjadi di negara ini.

Provinsi Aceh merupakan wilayah Indonesia paling barat yang memiliki karakteristik geografis dan geologis yang sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, dan banjir bandang.Berbagai bencana telah terjadi di Aceh, dan yang paling besar yaitu rangkaian gempa bumi dan tsunami ini. Dengan kekuatan gempa mencapai 9,1 SR menyebabkan gelombang tsunami di Aceh yang mencapai ketinggan 24m saat menghantam daratan, kemudian meninggi hingga 30m di sejumlah daerah beberapa saat setelahnya. Secara geologis, Aceh berada dijalur pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera (Sumatera *fault/transform*) yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda yang dikenal dengan patahan Semangko.

Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh adalah wilayah bagian tengah yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Gayo.Akibat tsunami, kerusakan berat terjadi sepanjang pesisir Aceh barat, Aceh Besar, sebagian wilayah pesisir Banda Aceh dan Meulaboh.

***Dampak Tsunami di Provinsi Aceh***

Dalam bencana tsunami ini, dampak yang dihasilkan sangat besar dan menyeluruh di lapisan kehidupan seperti infrastruktur pemukiman, pelayanan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Dari sekitar 4,4 juta total populasi provinsi Aceh 5% penduduk tewas dan 10% penduduk mengungsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk di Nias-Aceh tahun 2004, setelah gempa dan tsunami tercatat 209.000 orang masih mengungsi di rumah kerabat, barak penampungan, maupun tenda pengungsian.Dampak tsunami terhadap infrastuktur mengkibatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, keamanan, sosial dan pemerintahan menjadi terhenti dikarenakan kerusakan parah pada bangunannya.

Di bidang pelayanan kesehatan, sebelum tsunami dari 228 kecamatan di Provinsi NAD tercatat ada 240 puskesmas, 789 puskesmas pembantu, dan 237 puskesmas keliling. Sedangkan rumah sakit umum hanya ada di 12 dari 21 Kabupaten/kota yang ada.Pasca tsunami dampak yang terjadi di bidang ini sekitar delapan rumah sakit dan 114 puskesmas rusak dan hancur.Dari 10 lapangan udara di Aceh, 8 diantaranya rusak.Kerusakan juga terjadi pada 14 dari 19 pelabuhan di Aceh.Beberapa pelabuhan yang mengalami kerusakan berat ialah pelabuhan Malahayati (Kab.Aceh Besar), pelabuhan Meulaboh (Kab.Aceh Barat) dan pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu sebagai infrasruktur paling penting sekitar 3000 km jalan rusak dengan kerusakan cukup parah sehingga hanya tinggal 28,4 % dalam keadaan baik, dan 71,6 % dalam keadaan rusak dengan persentase 35,7 % rusak ringan dan 35,9 % rusak parah. Pada bidang perumahan, sekitar 500 ribu orang di Aceh dan 13 ribu orang di Nias kehilangan rumah. Menurut laporan dari kerjasama pemerintah dengan pihak pendonor dalam upaya rekonstruksi pasca tsunami, ada sekitar 1000 desa yang terkena dampak tsunami terdiri dari kurang lebih 127.000 rumah penduduk hancur dan 152.000 unit rumah rusak berat. Dengan total jumlah kerusakan mencapai Rp 13,4 Triliun.

Perekonomian Aceh mengalami kehancuran di segala sektor ekonomi setelah bencana gempa bumi dan tsunami, terutama di daerah yang terkena langsung yaitu di wilayah pesisir Barat Aceh.Bencana ini mengakibatkan perubahan struktural ekonomi masyarakat karena banyak penduduk meninggal dan mengungsi serta kelihangan mata pencaharian.Akibatnya tidak adanya pendapatan masyarakt dikarenakan sarana maupun prasaana pendukung ekonomi masyarakat seperti pasar, tempat usaha, rumah serta lahan pertanian mengalami kerusakan.Secara keseluruhan, penurunan perekonomian di Aceh mencapai 5% dan di Nias sekitar 20%. Sebelum tsunami menurut data BPS tahun 2004 dari total 4,5 juta penduduk Aceh, sekitar 28,4 % atau 1,2 juta penduduk hidup dalam kemiskinan. Tingkatan ini lebih tinggi 11,7% dari tingkat kemiskinan nasional Indonesia yaitu sebesar 16,7 % di tahun yang sama. Kemudian setelah tsunami tingkat kemiskinan di Aceh meningkat mencapai 32,6 % berdasarkan data BPS tahun 2005.

Penurunan jumlah lahan juga karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan begitu banyak aktivitas pembangunan yang dilakukan di Aceh khususnya pasca bencana tsunami terjadi. Kondisi ini menyebabkan permintaan terhadap kebutuhan lahan maupun bahan baku untuk upaya rekonstruksi seperti kayu semakin meningkat yang pada akhirnya terjadi ahli fungsi lahan ke lahan non pertanian untuk kebutuhan seperti perumahan, industri dan sebagainya untuk memenuhi permintaan yang ada. Ahli fungsi lahan juga disebabkan oleh kegiatan illegal loging dan pembakaran hutan di Aceh.Dengan beralihnya fungsi lahan ini, ruang terbuka hijau di Aceh semakin berkurang dan keadaan lahan semakin kritis. Total lahan kritis di Aceh mencapai 1.668.264,59 ha yang terbagi atas lahan agak kritis 1.205.241,12 ha, kritis 395.680,28 ha dan sangat kritis 67.343,19 ha.

Dampak bencana alam tsunami yang terjadi juga menghancurkan ekosistem kawasan pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).Kementrian Negara Lingkungan Hidup menyatakan, dampak tsunamiterhadap wilayah pesisir dan laut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut:

1. Tercemarnya laut, air darat dan air tanah; terjadi perubahan garis pantai.
2. Hilangnya proteksi alam (mangrove) yang berfungsi sebagai pelindung pemukimandari gelombang dan angin serta sebagai daerah pemijahah (*spawning ground*), daerahasuhan (*nursery ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*) bermacam biota lauttermasuk ikan.
3. Tercemar dan rusaknya terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung danpemijahan ikan.
4. Berkurangnya/hilangnya sumber daya ikan dan spesies pesisir (potensi*biodiversity*).
5. Rusaknya ekosistem lahan basah; dan rusaknya ekosistem buatan (budidaya, pelabuhandan kampung nelayan yang memberikan dampak yang signifikan bagi kegiatan perekonomian)

Pasca tsunami tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang mencapai angka 50-75% di beberapa daerah di Aceh seperti di Pulau Banyak kabupaten Aceh Singkil, sedangkan di sekitar Pulau Simeulue dan Pulau Rubiah Kota Sabang tingkat kerusakan mencapai 38-44,25%. Sehingga secara keseluruhan berdasarkan data BRR, kerusakan terumbu karang (*Coral Reef*) mencapai 19.000 ha dari total 97.250 ha terumbu karang yang tersebar di pesisir Aceh. Keadaan hutan mangrove juga telah mengalami banyak kerusakan di Aceh sebelum tsunami.Hanya 10% dari 350.000 ha hutan mangrove di Aceh terutama di Pulau Simeulue yang masih berada dalam kondisi baik.

Kebanyakan kawasan mangrove di sekitar Aceh sudah terdegradasi sebelum tsunami 2004.Setelah tsunami dampak juga terjadi pada keberadaan hutan mangrove di Aceh. Dari sekitar 350.000 ha hutan mangrove di Aceh, sekitar 50,3% terkena dampak tsunami yaitu sekitar 174.590 ha luas mangrove rusak. Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2005, kerusakan yang melanda hutan mangrove akibat tsunami di Aceh diperkirakan hampir semuanya masih berpotensi untuk dilakukan rehabilitasi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak tsunami terjadi pada semua elemen kehidupan di Aceh.Sehingga upaya pemulihan juga harus segera dilakukan.Namun melihat dampak yang ditimbulkan sangat besar, pemerintah mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh kebutuhan penanggulangan bencana. Untuk itu banyak bantuan dari luar seperti negara lain, lembaga donor, maupun organisasi internasional pemerintah (IGO) dan non-pemerintah (NGO) yang terlibat untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam kegiatan penanggulangan bencana pasca tsunami tersebut.

***Organisasi Internasional World Wide Fund for Nature (WWF)***

WWF merupakan organisasi internasional yang tidak terikat pada pemerintah maupun organisasi lain di suatu negara dan menjalankan setiap program secara objektif. Saat ini WWF merupakan organisasi pelestarian lingkungan independen terbesar di dunia. WWF memiliki 4,7 juta pendukung dan sebuah jaringan global yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 22 kantor program dan lima organisasi afiliasi. Pada tahun 1962 WWF Indonesia berdiri sebagai bagian dari jaringan WWF global yang memiliki kantor program di Indonesia dibawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Namun pada tahun 1998, WWF resmi menjadi lembaga atau organisasi nasional berbadan hukum yayasan sehingga WWF Indonesia memiliki entitas legal, independen dan berbadan hukum sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Hal ini membuat WWF Indonesia dapat membentuk struktur organisasi sendiri, kemandirian dan fleksibilitas dalam menggalang dana dan mengembangkan program, serta memperluas cakupan bidang kerja.

Pada tsunami tahun 2004, WWF terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi.Hal ini karena pada upaya rekonstruksi khususnya pada rekonstruksi rumah hunian masyarakat, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan kayu karena kondisi hutan Indonesia dan hutan Aceh yang mengalami degradasi setiap tahunnya.Untuk itu WWF datang membantu memenuhi kebutuhan tersebut karena sesuai dengan kapasitas mereka sebagai organisasi yang bergerak dibidang konservasi lingkungan. Selain itu ada beberapa program lain yang dibentuk WWF yang merupakan upaya dalam melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat mendatangkan bencana berkelanjutan.

***Peran WWF dalam Kegiatan Rekonstruksi***

1. ***Timber for Aceh (TFA)***

Upaya rekonstruksi hunian masyarakat yang hancur akibat tsunami dilakukan pemerintah dengan bantuan dari berbagai pihak khususnya dalam pemenuhan bahan baku berupa kayu. Pemerintahan Aceh telah berkomitmen untuk mempertahankan Aceh sebagai provinsi hijau. Untuk itu proses rehabilitasi dan rekontruksi Aceh diharapkan dapat tetap dijalankan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hutan Aceh. Meski kebutuhan kayu sangat tinggi, tapi penggunaan kayu legal dan berasal dari hutan yang lestari tetap diwajibkan.Berdasarkan keadaan tersebut, WWF menawarkan solusi dengan membentuk program *Timber for Aceh* (TFA). Program *Timber for Aceh* (TFA) merupakan hasil kerjasama antara WWF, *Conservation Internationa*l (CI), dan *American Forest &Paper Association* (AF&PA)untuk menghimbau organisasi yang terlibatdalam rekonstruksi agar menggunakan kayu yang berasal dari hutanyang dikelola secara lestari. Kegiatan ini diadakan berdasarkan perhatian WWF-Indonesia terhadap kebutuhan akan pengadaan kayu legal dan lestari yang tinggi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tanpa menimbulkan penambahan kerusakan jangka panjang terhadap hutan di Indonesia yang telah banyak dieksploitasi, termasuk hutan di Aceh.

Departemen PekerjaanUmum telah membangun1.500 Tempat Penampungan Sementara (*Temporary Location Centers/TLC*) untuk menampung sekitar 90.000 orang. Akan tetapi sekitar 190 ribu orang tetap tidak memiliki tempat tinggal di Aceh dan 13.500 keluarga di Nias.Sekitar 67.500 orang tetap tinggal di tenda-tenda.Untuk itu pemerintah memperkirakan para pengungsi masih memerlukan ketersediaan antara 90.000 - 110.000 rumahpermanen.Setelah mendapat respon positif dan dukungan dari pemerintah, program TFA ini ditandai dengan penandatanganan MoU pada tanggal 20 Maret 2006 di Banda Aceh.Dalam MoUtersebut, pemerintah merekomendasikan kayu yang berasal darisumber legal dan lestari baik dari sumber dalam negeri maupun yangberasal dari hibah luar negeri. dalam pelaksanaan program ini, WWF-Indonesia bekerja sama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*(IFRC) dengan dukungan dari pemerintah NangroeAceh Darussalam dan mulai menggalangkan donasi kayu untuk Aceh di luar negeri dan hasil kayu yang diperoleh WWF langsung diserahkan kepada lembaga kemanusiaan yang memiliki program perumahan seperti IFRC, *Catholic Relief Service (CRS), Muslim Aid* dan *Habit for Humanity Indonesia*.

Hasil yang diperoleh dari kerjasama program *Timber for Aceh* ini terhitung pada 20 Maret 2006 sampai dengan 2007 WWF telah mendatangkan lebih dari 46.000 m3 kayu hibah dari luar negeri secara bertahap yang dipakai untuk pembangunan perumahan di bawah program perumahan sementara dan permanen oleh *International Federation Red Cross*, Oxfam, Premier *Urgénce* dan *the British Red Cross Society* serta beberapa NGO lain. Program TFA ini berakhir pada Desember 2007 dan*British Red Cross* menjadi lembaga yang terakhir mendatangkan kayu dari luar Aceh. Setelah berakhir total bantuan kayu yang diperoleh dari luar negeri lebih dari 46 ribu m3 kayu, maka secara langsung telah menyelamatkan 1200 hektar hutan Aceh dalam setahun.

1. ***Monitoring Illegal Logging***

Sebagai kelanjutan dari program Timber for Aceh, WWF melakukan pemantauan praktek pembalakan liar pasca tsunami di Aceh. Kegiatan monitoring ini dilakukan karena ditengah permintaan bahan baku kayu yang besar untuk rekonstruksi, banyak pihak yang menyalahgunakan keadaan tersebut dengan melakukan praktek pembalakan liar besar-besaran mengatasnamakan rekonstruksi. *Monitorin*g dilakukan di titik-titik kawasan tertentu di Aceh yang kasus aktivitas illegal loggingnya tergolong tinggi. Dari program ini terbentuk suatu kelompok kerja (pokja) yang bernama lembaga Advokasi Hutan Aceh yang anggotanya terdiri dari beberapa LSM lingkungan seperti Flora Fauna Internasional (FFI), *Conservation International* (CI), Yayasan PeNA (Peduli Nanggroe Aceh), Mapayah (Masyarakat Penyayang Alam dan Lingkungan Hidup), JAKAD Leuser dan Econa.

WWF Indonesia memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi anggota pokja dan LSM lokal dampingan khususnya dalam hal investigasi, jurnalistik, serta fotografi.Cara kerja kelompok ini ialah dengan melakukan advokasi untuk meminimalkan aktivitas pembalakan liar yang terjadi di kawasan lindung hutan alam Aceh yang bernilai konservasi tinggi serta koridor satwa dari pengalihan lahan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menangani pelaku pembalakan liar tersebut.

**Peran WWF dalam Kegiatan Rehabilitasi**

1. ***Green Coast Project***

Kondisi ekosistem pesisir mengalami kerusakan paling parah.Masyarakat di wilayah pesisir yang bergantung pada sektor tersebut kehilangan mata pencahariannya.Oleh karena itu pemulihan wilayah pesisir pasca tsunami dilakukan WWF dengan membentuk program khusus kawasan pesisir yaitu program*Green Coast.* Program ini merupakan kerja sama antara WWF,*Wetlands Internasional*, Both ENDs dan IUCN dengan dukungan dana dari OXFAMBelanda. [*Green Coast Project*](https://www.wwf.or.id/?2921) merupakan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tidak hanya mengembalikan kondisi ekologis ekosistem pesisir, tetapi juga meningkatkan alternatif mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam pesisir.Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, belum banyak pihak yang memberikan perhatian secara khusus terhadap rehabilitasi ekosistem pesisir yang sistematis dan berkelanjutan.

[*Green Coast Project*](https://www.wwf.or.id/?2921) mengkombinasikan rehabilitasi ekosistem pesisir dengan upaya perbaikan mata pencaharian masyarakat dengan memberikan hibah melalui cara yang ramah lingkungan, yakni dengan memadukan restorasi ekosistem mangrove/bakau dengan kegiatan ekonomi skala kecil berbasis masyarakat.Sekitar 56.502 ha kawasan pesisir akan direhabilitasi dengan 27.532 ha ditanamibibit mangrove, dan sisanya ditanami tanaman pantai. Dalam pelaksanaan program ini, WWF bekerjasama dengan *Wetlands International Indonesia Programme* (WIIP), BRR serta BPDAS Krueng Aceh dibawah pengawasan Departemen Kehutanan.Penanaman bakau dilakukan dengan luas pengawasan sepanjang pantai timur hingga barat Aceh, mulai Aceh Timur, Sabang, hingga Simeulue.Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam merehabilitasi lahan mulai dari tahap perencanaan, penyiapan, penanaman dan perawatan bibit. Selain menyediakan sendiri bibit mangrove yang akan dihibahkan, WWF juga menjadi fasilitator bagi negara donor, LSM atau pihak lain yang ingin menyalurkan donasinya pada upaya rehabilitasi *green coas*t ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, tedapat 73 lembaga atau pemerintah asingyang bertindak sebagai donor dan lebih dari 190 NGO Internasional dan nasional yang bertindak sebagai fasilitator. Namun hanya130 NGO yangmelakukan rehabilitasi penanaman mangrove atau terlibat dalam restorasi lingkungan daerahpesisir.Untuk itu pada tahap pertama program ini yaitu pada 2005, WWF melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menanam bakau.Sekitar 25.000 bibit mangrove disebar ke lokasi paling parah seperti Banda Aceh dan sebagian pesisir Aceh Besar.

Hingga awal 2006 dalam program itu selain menanam dan mengawasi sendiri, WWF mulai memfasilitasi sekitar 31 LSM lokal dan 29 kelompok masyarakat korban tsunami dalam melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir. Sampai akhir 2006, sekitar 30 juta bibit mangrove telah ditanam pada wilayah yang terkena tsunami.Program ini berakhir pada Maret 2009. Setelah lima tahun tsunami, dari data pemerintah sekitar 26 ribu ha kawasan butan bakau telah direhabilitasi dan 28 rb ha pantai juga telah ditanami kembali. Selain restorasi mangrove, WWF mengmplementasikan *Green Coast Project* melalui Program Budidaya Udang berbasis Lingkungan.Aceh selama ini terkenal sebagai penghasil udang dan induk udang windu (P. Monodon) yang pada tahun 2000an telah mengalami penurunan dan semakin menurun pasca bencana.Dengan kondisi seperti itu, banyak permintaan dari masyarakat kepada lembaga donor maupun pemerintah untuk merehabilitasi tambak.

Menyikapi situasi tersebut, WWF-Indonesia berupaya mengurangi dampak negatif dari kegiatan rehabilitasi tambak terutama terhadap kualitas lingkungan. Sejak 2005, WWF Indonesia mengembangkan Panduan Praktek Manajemen Lebih Baik untuk tambak udang di Aceh bersama NACA (*The Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific)* , ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*), IFC (*The International Finance Corporation*) dan FAO (*The Food and Agriculture Organization of the United Nation*). WWF Indonesia dan NACA melakukan pendampingan langsung di Kecamatan Pidie dalam menerapkan budidaya udang berwawasan lingkungan.Berkat upaya ini, pada tahun 2007, hasil panen menunjukkan capaian yang cukup baik

1. ***Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)***

WWF Indonesia Kantor Program Aceh mendorong adanya upaya perlindungan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terpadu dan berkelanjutan.Hal ini dilakukan karena semakin tingginya tingkat kerusakan DAS di Aceh sebagai dampak dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu WWF bersama Yayasan Pemerhati Dunia Hijau Indonesia (PADHI) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan didukung oleh *American Red Cross* telah membantu memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Forum DAS Krueng Sabee. Forum ini bertujuan mendorong pengelolaan DAS secara bersama dan berkelanjutan dari hulu ke hilir dengan melibatkan peran serta berbagai pihak untuk memastikan keberlangsungan fungsi ekologis hutan, menjaga ketersediaan air, kelestarian satwa, dan meningkatkan pendapatan penduduk.Hingga saat ini keberadaan Forum DAS Krueng Sabee berdampak positif pada upaya mengurangi kerusakan lingkungan lebih parah terutama di bagian hulu sungai

**Kesimpulan**

WWF Indonesia menunjukkan perhatiannya terhadap kondisi Aceh pasca tsunami dalam upaya penanggulangan bencana khususnya pada kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi kondisi hutan maupun pesisir Aceh.Tujuannya ialah meminimalkan dampak negatifrekonstruksi terhadap lingkungandanmempertahankan produktivitas alam serta memelihara keanekaragaman hayati jangka panjang. Ada beberapa peran yang telah dilakukan WWF sepertimembentuk program *Timber for Aceh (TFA)* , melakukan *monitoring* pembalakan liar. Kemudian pada kegiatan rehabilitasi, WWF membentuk program rehabilitasi kawasan pesisir (*Green Coast Project*) melalui restorasi hutan mangrove dan budidaya udang berbasis lingkungan sebagai bagian dalam memulihkan matapencaharian masyarakat dan terakhir WWF membentuk Forum DAS Krueng Sabee yang bertujuan mendorong pengelolaan DAS untuk memastikan keberlangsungan fungsi ekologis alam di Aceh pasca Tsunami.

Keterlibatan WWF pada upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh ini karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi alam pasca tsunami.Dalam upaya manajemen penanggulangan bencana alam, pemerintah maupun lembaga donor lainnya lebih aktif pada tahap tanggap darurat sedangkan pada tahap selanjutnya yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi khususnya pada lingkungan alam dan ekosistem di Aceh kurang mendapat perhatian.Selain itu juga karena keterbatasan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memenuhi kebutuhan rekonstruksi pasca tsunami. Hal ini yang membuat WWF dan juga NGO lain dari berbagai bidang bekerjasama membantu melengkapi keterbatasan pemerintah agar dapat mengembalikan keadaan masyarakat maupun Aceh seperti semula. Dari semua peran WWF dalam kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami yang dilakukan dengan membentuk beberapa program utama, program Timber for Aceh (TFA) merupakan program WWF yang menunjukkan hasil paling signifikan dalam upaya penanggulangan bencana tsunami ini. Oleh karena itu, dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak selalu dibutuhkan WWF dalam menjalankan program kerjanya di Aceh dan juga seluruh Indonesia.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

A.A Perwita & Y. M Yani.2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ade Maman Suherman, 2003.*Organisasi Internasional dan Integrasi EkonomiRegional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Archer. 1983. *International Organization.* London: Allen & Unwin Ltd.

Bennet, Le Roy A. 1997.*International Organization: Principels and Issues*: New Jersey. Prentice Hall Inc.

Fauzi.A, 2004.*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Heins. 2008. *NGO’s In Internatonal Society*: New York: Palgrave Macmillan.

Holsti.KJ, 1983.*Politik Internnasional: Kerangka Untuk Analisis*: Jilid 2, Jakarta. Erlangga.

Mas’oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: Pustaka LP3ES

May Rudy, Teuku. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Utama

Sutamihardja, 2004.*Perubahan Lingkungan Global: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan,* Sekolah Pascasarjana;IPB.

***Jurnal***

Sudarmadji, 2008.*Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah.*

***Media Online***

Aceh Insight, 2013. *WWF Sosialisasikan Modul Rekonstruksi Hijau Pasca Bencana,* tersedia di [http://acehinsight.com/2013/10/20/wwfsosialisasikan-modul-rekonstruksi-hi jau pasca-bencana/](http://acehinsight.com/2013/10/20/wwfsosialisasikan-modul-rekonstruksi-hi%09jau%20%09pasca-bencana/) diakses pada 15 Maret 2016.

Adi Warsidi, 2007. *Kayu Hibah Untuk Aceh.*tersedia di <http://m.tempo.co/read/news/2007/01/09/06190896/kayu-hibah-untuk-aceh/>diakses pada 13 Maret 2016.

Bappenas, *Bab 34 : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Sumatera Utara.* [pdf] terdapat di http://www.bappenas.go.id

BBC News, *Indonesia Negara Rawan Bencana*. Tersedia di http://www.bbc.com/indonesi/berita\_indonesia/2011/08/110810\_indonesia\_tsunami.html diakses pada 10 Agustus 2016

Docslide “*Bencana Alam yang terjadi di Asia Tenggara”* tersedia di http://www.documentas.tips/documents.bencana-alam-asia-teggara.html diakses pada 24 Mei 2016

Down to Earth, 2005.*Permintaan kayu melonjak, banjir besar menghantam.* Tersedia di http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/permintaan-kayu- Tersedia di http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/permintaan-kayu-

Forest Watch Indonesia(FWI) dan Global Forest Watch (GFW), 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*.Bogor, Indonesia, tersedia di <http://www.wri.org/> di unduh pada 16 Maret 2016.

George Kuru, Consultant, 2005. *Penilaian FAO Mengenai Permintaan Dan Penawaran (Penyediaan) Kayu Untuk Rekonstruksi Pasca Tsunami Di Indonesia.* tersedia di <http://www.fao.org/foresty/> di unduh pada 16 Maret 2016

Hadi Purnomo, Ronny Sugiantoro, 2010 *Manajemen: Bencana Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*. (pdf)

Indonesia, Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi. 2005. A*ceh dan Nias Setahun Setelah Tsunami: Upaya Pemuliahan dan Langkah ke Depan, t*ersedia di <http://siteresources.worldbank.org/> di unduh pada 13 Maret 2016.

Kementerian Kehutanan RI, 2014. *Statistik Kehutanan Indonesia 2013*, Jakarta: Kementerian Kehutanan RI, tersedia di <http://www.dephut.go.id/>

M. Nizar Abdurrani, 2013*. Pelajaran dari Moratorium Logging Aceh* tersedia di <http://greenjournalist.net/hutan/pelajaran-dari-moratorium-logging-aceh/>

Mongabay, 2014.Melihat Pemnbangunan A eh Pasca Tsunami. Tersedia di <http://www.mongabay.co.id/2014/12/28/melihat-pembangunan-aceh-pasca-tsunami/>

Muslim Aid, *Problematika Ilegal Logging dalamRekonstruksi Aceh*. Tersedia di <http://slideplayer.info/slide/2706450/>

WWF Indonesia, *Kehutanan,* tersedia di [http://www.wwf.or.id/tentang\_wwf/upaya\_kami/forest\_spesies/tentang\_fore st\_sp esies/kehutanan/;](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_fore%20st_sp%09esies/kehutanan/) internet diakses pada 12 Maret 2016.

WWF Indonesia, 2007.*Timber For Aceh : Serah Terima Rumah Bantuan Menggunakan Kayu Dona*si, tersedia di <http://www.wwf.or.id/?2843/> diakses pada 12 Maret 2016.

WWF Indonesia, 2006.*Timber Marketplace- Upaya Pemenuhan Komitmen Rekonstruksi Aceh Secara Lestari,* tersedia di <http://www.wwf.or.id/?2927/>diakses pada 14 Maret 2016.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: nathaliea710@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)